

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pelaksanaan otonomi daerah mengharuskan setiap daerah untuk membiayai dan mengatur keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan daerah diperoleh dengan cara mengoptimalkan pengelolaan sumber kekayaan daerah yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Agus, 2008). Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diandalkan Pemerintah adalah dari sektor pajak. Pajak daerah berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dibuktikan oleh Agus (2008) dalam penelitiannya berjudul Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi cukup besar dan sudah cukup efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2003/2004 – 2007/2008. Salah satu persoalan yang kerap terjadi masih adanya piutang pajak yang belum tertagih yang membuat realisasi pajak daerah tidak mencapai target yang telah ditentukan, permasalahan ini pun pernah dialami oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda )Kota Bandung.

Permasalahan yang terjadi menurut Nurhambali (2012) dalam tempo.co (27 Juli 2012), pemerintah Kota Bandung lamban dalam menyelesaikan piutang pajak tahun 2011 yang berjumlah sekitar Rp 3,8 Miliar. Jika melihat akumulasi dari tahun 2006 hingga 2011, piutang pajak itu mencapai angka Rp 23,4 Miliar. "Nilai pajak itu berasal dari sektor hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, BPHTB dan air

tanah,"(Nurhambali, 2012). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), piutang itu berasal dari sektor perhotelan Rp 344 juta, restoran Rp 539 juta, hiburan Rp 72 juta, reklame Rp 469 juta, parkir Rp 59 juta, BPHTB Rp 2,1 miliar dan air tanah 135 juta. Menurut Nurhambali (2012), persoalan ini mesti ditangani serius oleh pemerintah kota. Dinas yang memberikan izin usaha dengan dinas pendapatan daerah (Dispenda) Kota Bandung harus berkomunikasi, agar tidak terjadi piutang pajak dikemudian hari. Izin usaha hiburan yang dikelola oleh dinas terkait misalkan pariwisata, tidak seharusnya dinas memberikan izin operasionalnya, jika perusahaan yang dulu belum membayar pajak (Nurhambali, 2012).

Berdasarkan permasalahan di atas untuk mengetahui keefektifitasan pajak daerah, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) memerlukan informasi yang terjadi dilapangan. Informasi yang dapat digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) adalah dengan melihat seberapa besar target dan realisasi suatu pajak daerah dan dapat dilihat juga dari besarnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Jika dalam pelaksanaannya selalu melebihi target atau telah sesuai target yang telah ditentukan, ini berarti secara umum pemungutannya telah efektif, akan tetapi jika realisasi pajak daerah masih di bawah target yang ditentukan maka harus dilakukan perbaikan dalam pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, maka penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai **“Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pokok pikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Seberapa besar Potensi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung selama Tahun anggaran 2008/2009 – 2012/2013 ?
2. Seberapa besar Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung selama Tahun anggaran 2008/2009 – 2012/2013 ?
3. Sejauh mana Tingkat Efektivitas yang dihasilkan dari pemungutan Pajak Daerah di Kota Bandung selama Tahun anggaran 2008/2009 – 2012/2013?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui besarnya Potensi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung selama Tahun anggaran 2008/2009 – 2012/2013.
2. Mengetahui besarnya Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung selama Tahun anggaran 2008/2009 – 2012/2013.
3. Mengetahui Tingkat Efektifitas yang dihasilkan pemungutan Pajak Daerah di Kota Bandung selama Tahun anggaran 2008/2009 – 2012/2013.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Penulis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literature untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang efektivitas potensi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

2. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini sebagai bahan kajian dan referensi untuk menambah wawasan maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

3. Dispenda Kota Bandung

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan tambahan bagi pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan penelitian ini tentang keefektivitasan potensi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.